



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR  
27 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEMBAKAL,  
PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

**Menimbang**

- : a. bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEMBAKAL, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Besarnya uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal biaya penginapan dan makan minum telah ditanggung oleh panitia penyelenggara atau pihak ketiga lainnya, maka Pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri/mengikuti undangan kegiatan dari lembaga/instansi/panitia pengundang, hanya diberikan biaya transport dan uang harian sesuai tingkatan Pelaksana SPPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Besar uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sebesar 30%, sedangkan pada hari pertama dan hari terakhir dari yang tercantum pada Surat Tugas diberikan 100% dari uang harian sesuai tingkatan Pelaksana SPPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran I diubah.
4. Ketentuan Lampiran II diubah.
5. Ketentuan Lampiran III diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 6 Februari 2020



Diundangkan di Barabai

pada tanggal : 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020

NOMOR 11

**BESARAN UANG HARIAN DAN BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS  
DALAM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	TEMPAT KEDUDUKAN	KECAMATAN TUJUAN /DESA TUJUAN DALAM WILAYAH KECAMATAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN (Rp.)	
				TINGKAT A	TINGKAT B
1.	DESA	Haruyan	OH	75,000	60,000
2.		Labuan Amas Selatan	OH	75,000	60,000
3.		Labuan Amas Utara	OH	75,000	60,000
4.		Barabai	OH	75,000	60,000
5.		Pandawan	OH	75,000	60,000
6.		Batu Benawa	OH	75,000	60,000
7.		Hantakan	OH	75,000	60,000
8.		Batang Alai Selatan	OH	75,000	60,000
9.		Batang Alai Utara	OH	75,000	60,000
10.		Batang Alai Timur	OH	75,000	60,000
11.		Limpasu	OH	75,000	60,000
12.	<b>DESA TERPENCIL</b>	Barabai/sekitarnya yang sejarak	OH	100,000	85,000
13.	<b>DESA SANGAT TERPENCIL</b>	Barabai/sekitarnya yang sejarak	OH	200,000	150,000
14.	<b>DESA SANGAT SANGAT TERPENCIL</b>	Barabai/sekitarnya yang sejarak	OH	300,000	250,000

Catatan :

- Uang Harian terdiri dari: Uang Saku, Uang Makan, dan Transport Lokal
- Kriteria Desa Terpencil, yaitu: Desa Awang, Desa Batu Tunggal, Desa Pasting, Desa Tilahan, Desa Sumanggi Seberang, Desa Nateh, Desa Pembakulan, Desa Muara Hungi
- Kriteria Desa Sangat Terpencil, yaitu: Desa Haruyan Dayak, Desa Datar Ajab, Desa Hinas Kanan, Desa Kindingan, Desa Patikalain, Desa Hinas Kiri, Desa Atiran, Desa Juhu, Desa Datar Batung
- Kriteria Desa Sangat Sangat Terpencil, yaitu: Desa Batu Perahu, Desa Aing Bantai



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR 11 TAHUN 2020  
 TANGGAL 6 Februari 2020

**BESARAN UANG HARIAN, BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT, DAN BESARAN PLAFON BIAYA PENGINAPAN/HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN (Rp.)		BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORTASI (Rp)	BESARAN PLAFON BIAYA PENGINAPAN/HOTEL (Rp.)	
			TINGKAT A	TINGKAT B		TINGKAT A	TINGKAT B
1.	Banjarmasin	OH	400,000	350,000	171,000	500,000	400,000
2.	Banjarbaru	OH	400,000	350,000	152,000	500,000	400,000
3.	Banjar	OH	400,000	350,000	142,000	500,000	400,000
4.	Barito Kuala	OH	400,000	350,000	200,000	500,000	400,000
5.	Tapin	OH	400,000	350,000	84,000	500,000	400,000
6.	Hulu Sungai Selatan	OH	400,000	350,000	64,000	500,000	400,000
7.	Hulu Sungai Utara	OH	400,000	350,000	74,000	500,000	400,000
8.	Balangan	OH	400,000	350,000	74,000	500,000	400,000
9.	Tabalong	OH	400,000	350,000	103,000	500,000	400,000
10.	Tanah Laut	OH	400,000	350,000	181,000	500,000	400,000
11.	Tanah Bumbu	OH	400,000	350,000	327,000	500,000	400,000
12.	Kotabaru	OH	400,000	350,000	366,000	500,000	400,000

Catatan :

- Biaya transport sebagaimana tersebut di atas tidak diberikan jika menggunakan fasilitas kendaraan pemerintah.
- Biaya dari terminal/tempat pemberhentian ke tempat tujuan diberikan sebesar Rp. 50.000,00 (PP).
- Biaya transport sebagaimana tersebut di atas merupakan biaya pulang-pergi.



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 11 / AN/P/ 2020  
 TANGGAL : 6 Februari 2020

**BESARAN UANG HARIAN, BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT, DAN BESARAN PLAFON BIAYA PENGINAPAN/HOTEL  
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	PROVINSI TUJUAN	BATUAN	BESARAN UANG HARIAN (Rp.)		BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT UDARA (KELAS EKONOMI) (Rp.)	BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT BANDARA (Rp.)	BESARAN PLAFON BIAYA PENGINAPAN/ HOTEL (Rp.)	
			TINGKAT A	TINGKAT B			TINGKAT A	TINGKAT B
1	Aceh	OH	700,000	500,000	6,522,000	400,000	600,000	500,000
2	Sumatera Utara	OH	700,000	500,000	5,912,000	400,000	600,000	500,000
3	Riau	OH	700,000	500,000	4,522,000	400,000	600,000	500,000
4	Kepulauan Riau	OH	700,000	500,000	5,078,000	400,000	600,000	500,000
5	Jambi	OH	700,000	500,000	4,693,000	400,000	600,000	500,000
6	Sumatera Barat	OH	700,000	500,000	5,142,000	400,000	600,000	500,000
7	Sumatera Selatan	OH	700,000	500,000	4,522,000	400,000	600,000	500,000
8	Lampung	OH	700,000	500,000	3,912,000	400,000	600,000	500,000
9	Bengkulu	OH	700,000	500,000	5,600,000	400,000	600,000	500,000
10	Bangka Belitung	OH	700,000	500,000	4,415,000	400,000	600,000	500,000
11	Banten	OH	700,000	500,000	3,495,000	400,000	600,000	500,000
12	Jawa Barat	OH	700,000	500,000	4,000,000	400,000	600,000	500,000
13	DKI Jakarta	OH	700,000	500,000	3,495,000	400,000	600,000	500,000
14	JawaTengah	OH	700,000	500,000	4,522,000	400,000	600,000	500,000
15	DI Yogyakarta	OH	700,000	500,000	4,522,000	400,000	600,000	500,000
16	Jawa Timur	OH	700,000	500,000	4,522,000	400,000	600,000	500,000
17	Bali	OH	700,000	500,000	5,420,000	400,000	600,000	500,000

No.	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN (Rp.)		BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT UDARA (KELAS EKONOMI) (Rp.)	BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT BANDARA (Rp.)	BESARAN PLAFON BIAYA PENGINAPAN/ HOTEL (Rp.)	
			TINGKAT A	TINGKAT B			TINGKAT A	TINGKAT B
18	Nusa Tenggara Barat	OH	700,000	500,000	8,888,000	400,000	600,000	500,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	700,000	500,000	7,920,000	400,000	600,000	500,000
20	Kalimantan Barat	OH	700,000	500,000	5,776,000	400,000	600,000	500,000
21	Kalimantan Tengah	OH	700,000	500,000	2,000,000	400,000	600,000	500,000
22	Kalimantan Timur	OH	700,000	500,000	2,000,000	400,000	600,000	500,000
23	Kalimantan Utara	OH	700,000	500,000	3,600,000	400,000	600,000	500,000
24	Sulawesi Utara	OH	700,000	500,000	6,630,000	400,000	600,000	500,000
25	Gorontalo	OH	700,000	500,000	6,100,000	400,000	600,000	500,000
26	Sulawesi Barat	OH	700,000	500,000	6,130,000	400,000	600,000	500,000
27	Sulawesi Selatan	OH	700,000	500,000	5,710,000	400,000	600,000	500,000
28	Sulawesi Tengah	OH	700,000	500,000	6,130,000	400,000	600,000	500,000
29	Sulawesi Tenggara	OH	700,000	500,000	6,480,000	400,000	600,000	500,000
30	Maluku	OH	700,000	500,000	8,010,000	400,000	600,000	500,000
31	Maluku Utara	OH	700,000	500,000	8,010,000	400,000	600,000	500,000
32	Papua	OH	700,000	500,000	9,359,000	400,000	600,000	500,000
33	Papua Barat	OH	700,000	500,000	8,749,000	400,000	600,000	500,000


  
**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**  
**A. CHAIRANSYAH**